
RENCANA KERJA

TAHUN 2022



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. HM Bahrhun Kel. Berkoh Kec. Purwokerto Selatan
Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6841931

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka BPBD Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Renja merupakan dokumen

rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD ; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu :

” Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi fokus kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas yaitu:

Misi 1: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam

penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal-Pemalang;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2022 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman BPBD Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2022.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,** berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,** menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan

indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja BPBD tahun 2020 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2020 sebesar Rp. 6.357.572.680,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.956.822.680,- dan belanja langsung Rp. 4.400.750.000,- . Dalam pelaksanaannya terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 7.528.853.478,- dengan belanja tidak langsung Rp. 2.376.805.077,- dan belanja langsung Rp. 5.152.048.401,- . Penyerapan anggaran belanja langsung BPBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.338.375.566,- (78,15%) dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.152.048.401,- . Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dan Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana merupakan program dengan serapan anggaran terbesar (100%), sedangkan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam menunjukkan serapan terkecil yaitu 49,91%.

BPBD Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2020 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 6 program dan 26 kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPBD Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi keuangan program ; Persentase realisasi fisik program	%	100;100	90.97;100	100;100	84 ; 89,51	84 ; 89,51	0	84 ; 89,51	0
<u>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah</u>	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar ; Biaya sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Bulan ; Jenis	60 ; 2	12 ; 2	12 ; 2	12 ; 2	100 ; 2	0	24 ; 2	40 ; 100
<u>Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah</u>	Alat tulis kantor yang tersedia ; Perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia ; Alat listrik elektronik yang tersedia ; Makan minum harian pegawai, rapat dan jamuan tamu yang tersedia ; Cetak dan penggandaan yang tersedia ; Bahan perlengkapan kerja yang tersedia	Bulan ; Bulan ; Jenis ; Bulan ; Lembar ; Jenis	60 ; 60 ; 3 ; 60 ; 295955 ; 2	12 ; 12 ; 3 ; 12 ; 139.955 ; 2	12 ; 12 ; 3 ; 12 ; 60.000 ; 2	12 ; 12 ; 3 ; 12 ; 60.000 ; 2	100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100 ; 100	0	24 ; 24 ; 3 ; 24 ; 199.955 ; 2	40 ; 40 ; 100 ; 40 ; 67 ; 100
<u>Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah</u>	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Bulan	60	12	12	12	100	0	24	40

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah</u>	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Bulan	60	12	12	12	100	0	24	40
<u>Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah</u>	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5	5	5	5	100	0	5	100
<u>Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah</u>	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Unit	380	340	350	350	100	0	350	92
<u>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah</u>	Gedung pemerintah dalam keadaan baik	Bulan	60	12	12	12	100	0	24	40
<u>Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah</u>	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik ; Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Bulan ; Bulan	60 ; 60	12 ; 12	12 ; 12	12 ; 12	100 ; 100	0	24 ; 24	40 ; 40
<u>Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah</u>	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan	60	12	12	12	100	0	24	40
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan ; Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100 ; 100	100 ; 100	100 ; 100	100 ; 100	100;100	0	100;100	100;100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi perangkat daerah ; Jumlah publikasi informasi perencanaan	Dokumen ; Kali	25 ; 20	5 ; 11	5 ; 4	5 ; 4	100 ; 100	0	10 ; 14	40 ; 70
<u>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam</u>	Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat ; Rasio pengurangan risiko bencana ; Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	% ; % ; %	100 ; 50 ; 100	100 ; 25 ; 100	100 ; 35 ; 100	100 ; 25 ; 100	100 ; 71 ; 100	0	100 ; 25 ; 100	100 ; 50 ; 100
<u>Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam</u>	Jumlah peserta sosialisasi penyebarluasan informasi potensi bencana alam di tingkat desa ; jumlah informasi potensi bencana yang diinformasikan	Orang ; Kali	800 ; 24	100 ; 6	0 ; 0	0 ; 0	0 ; 0	0 ; 0	100 ; 6	12,5 ; 25
<u>Posko siaga dan penanganan darurat bencana</u>	Jumlah kecamatan yang mendapatkan penanganan darurat bencana dan atau air bersih untuk masyarakat dampak kekeringan ; laporan bencana dari masyarakat yang ditindaklanjuti	Kec ; %	27 ; 100	27 ; 100	27 ; 100	27 ; 100	100 ; 100	0	27 ; 100	100 ; 100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>Bimbingan teknis penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana</u>	Jumlah SDM penilai kerusakan dan kerugian akibat bencana yang mempunyai kompetensi	Orang	350	0	0	0	0	0	0	
<u>Pengembangan desa tangguh bencana</u>	Desa tangguh bencana yang terbentuk	Desa	16	4	1	1	100	0	5	31
<u>Pengembangan Forum Resiko Bencana</u>	Jumlah forum peduli bencana di	Desa	14	2	1	1	100	0	3	21
<u>Bintek SAR dan latihan gabungan penyelamatan, evakuasi dan penanganan darurat</u>	Jumlah Tim SAR yang Mengikuti Pelatihan	Orang	600	100	0	0	0	0	100	16
<u>Sosialisasi dan fasilitasi simulasi penanganan darurat bagi pelajar</u>	Jumlah pelajar yang mengikuti sosialisasi penanganan darurat ketika terjadi bencana	Orang	800	100	0	0	0	0	100	12

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>Dana Siap Pakai (DSP) pada Tahap Tanggap Darurat Bencana</u>	Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, evakuasi pengungsian dan pemulihan sarana prasarana dalam kondisi darurat yang tertangani	%	100	100	100	100	100	0	100	100
<u>Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana</u>	Prosentase peralatan bencana yang sesuai standar ; prosentase peralatan bencana dalam kejadian	% ; %	100 ; 100	60 ; 100	70 ; 100	70 ; 100	100 ; 100	0	70 ; 100	70 ; 100
<u>Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana</u>	Persentase logistik dan sarana prasarana korban bencana yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	0	100	100
<u>Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam</u>	Prosentase sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana yang telah direhab atau direkonstruksi	%	100	100	100	100	100	0	100	100
<u>Rencana kontigensi bencana longsor</u>	Dokumen rencana kontigensi bencana longsor	Dokumen	10	0	0	0	0	0	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Unit	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>Pembangunan Sarana dan Prasarana Antisipasi Bencana</u>	Jumlah sarana dan prasarana mitigasi bencana yang dibangun	Unit	25	5	0	0	0	0	5	20
<u>Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana</u>	Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana ; Informasi peta rawan bencana	% ; %	100 ; 100	0 ; 100	37,04 ; 100	3,70 ; 100	10 ; 100	0	3,70 ; 100	3,70 ; 100
<u>Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</u>	Persentase kecamatan yang telah memiliki Peta Rawan Bencana	%	100	0	25	3,70	15	0	3,70	3,70
<u>Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam</u>	Jumlah peserta sosialisasi penyebarluasan informasi potensi bencana alam di tingkat desa ; jumlah informasi potensi bencana yang diinformasikan	Orang ; Kali	800 ; 24	100 ; 6	0 ; 0	0 ; 0	0 ; 0	0 ; 0	100 ; 6	12,5 ; 25
<u>Pembuatan Peta Daerah Rawan Bencana</u>	Jumlah kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	Dokumen	27	0	5	1	20	0	1	4
<u>Program Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</u>	Rasio pengurangan risiko bencana	%	50	25	35	25	71	0	25	71

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>Rencana kontinjensi bencana longsor</u>	Dokumentasi rencana kontinjensi longsor	Dokumen	11	1	0	0	0	0	1	9
Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan	%	100	25	25	25	100	0	25	25
<u>Pengembangan Desa Tangguh Bencana</u>	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Desa	22	4	1	1	100	0	5	18
<u>Pengembangan Forum Risiko Bencana</u>	Jumlah forum peduli bencana di desa yang terbentuk	Desa	18	2	0	0	0	0	2	11
<u>Sosialisasi dan Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi Pelajar</u>	Jumlah pelajar yang mengikuti sosialisasi penanganan darurat ketika terjadi bencana	Orang	1300	100	0	0	0	0	100	7

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
<u>Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam</u>	Persentase sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana yang telah direhab atau direkonstruksi	%	100	100	100	100	100	0	100	100
<u>Penyusunan Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</u>	Dokumen perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Dokumen	4	1	0	0	0	0	1	25
<u>Pembangunan Sarana dan Prasarana Antisipasi Bencana</u>	Jumlah sarana dan prasarana mitigasi bencana yang dibangun	Unit	25	5	0	0	0	0	5	20
<u>Bimbingan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana</u>	Jumlah SDM penilai kerusakan dan kerugian akibat bencana yang mempunyai kompetensi	Orang	350	0	0	0	0	0	0	0
<u>Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</u>	Persentase kejadian bencana yang tertangani dengan cepat dan tepat	%	100	100	100	100	100	0	100	100
<u>Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamat, Evakuasi dan Penanganan Darurat</u>	Jumlah Tim SAR yang mengikuti pelatihan	Orang	1350	0	0	0	0	0	0	0
<u>Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana</u>	Jumlah kecamatan yang mendapatkan penanganan darurat bencana dan atau air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan ; Laporan bencana dari masyarakat yang ditindaklanjuti	Kec ; %	27 ; 100	27 ; 100	27 ; 100	27 ; 100	100 ; 100		27 ; 100	100 ; 100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah peralatan yang tersedia dalam keadaan baik ; Persentase peralatan bencana yang sesuai ; Persentase peralatan bencana dalam keadaan baik	Buah ; % ; %	1850 ; 100 ; 100	340 ; 60 ; 100	350 ; 70 ; 100	350 ; 70 ; 100	100 ; 100 ; 100	0	690 ; 70 ; 100	37 ; 70 ; 100
Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya kebutuhan logistik dan sarana prasarana korban bencana ; Persentase logistik dan sarana prasaran korban bencana yang terpenuhi	Kec ; %	27 ; 100	27 ; 100	27 ; 100	27 ; 100	100 ; 100	0	27 ; 100	100 ; 100
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai 4. Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		0	0	0	0	100 ; 100 ; 100 ; 100	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis		0	0	0	0	2	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang		0	0	0	0	25	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang		0	0	0	0	10	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis		0	0	0	0	6	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis		0	0	0	0	1	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis		0	0	0	0	3	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan		0	0	0	0	12	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah cetakan yang tersedia 2. Jumlah penggandaan yang tersedia	Buah ; lbr		0	0	0	0	1.500 ; 43.000	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali		0	0	0	0	25	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis		0	0	0	0	3	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit		0	0	0	0	52	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit		0	0	0	0	21	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit		0	0	0	0	6	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis		0	0	0	0	4	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit		0	0	0	0	23	0	0
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit		0	0	0	0	20	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		0	0	0	0	54	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit		0	0	0	0	3	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis		0	0	0	0	2	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang		0	0	0	0	20	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan		0	0	0	0	12	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen		0	0	0	0	4	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen		0	0	0	0	3	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen		0	0	0	0	1	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan 2. Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat 3. Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%		0	0	0	0	100 ; 100 ; 100	0	0
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	Orang		0	0	0	0	113.000	0	0
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah monitoring yang dilakukan di daerah rawan bencana	Kali		0	0	0	0	10	0	0
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang		0	0	0	0	150	0	0
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta rawan bencana kecamatan yang disusun	Dokumen		0	0	0	0	2	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Dokumen		0	0	0	0	3	0	0
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana yang telah direhab atau direkonstruksi	Kegiatan		0	0	0	0	1	0	0
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang		0	0	0	0	900	0	0
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan penanganan darurat dan atau air bersih untuk masyarakat dampak kekeringan	Kec		0	0	0	0	27	0	0
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang tersedia	Jenis		0	0	0	0	2	0	0
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah pelayanan sistem dasar penanggulangan bencana	Kegiatan		0	0	0	0	2	0	0
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Kegiatan		0	0	0	0	1	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan		0	0	0	0	1	0	0

Purwokerto, 2021
 KEPALA PELAKSANA BPBD
 KABUPATEN BANYUMAS

TITIK PUJIASTUTI, S.H., M.Pd.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640402 199103 2 005

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

BPBD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. merumuskan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
- c. mengendalikan seluruh pelaksanaan program di lingkungan BPBD dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana agar sasaran strategis dapat tercapai;
- e. membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BPBD dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku guna menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyelia pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kegiatan berjalan dengan lancar;
 - h. memantau pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
 - i. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
 - j. mengesahkan dan mengarahkan administrasi kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan program di lingkungan BPBD dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sebagai bahan laporan program dan rencana yang akan datang;
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan BPBD sesuai dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas BPBD;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun susunan organisasi BPBD Kabupaten Banyumas terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - 1) Kasubag Perencanaan;
 - 2) Kasubag Keuangan;

- 3) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan , terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pencegahan;
 - 2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan;
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Kedaruratan;
 - 2) Kepala Seksi Logistik;
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Kepala Seksi Rekonstruksi;
6. UPTB;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp 13.770.819.291,- terurai dalam 2 program dan 10 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2020, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2020	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	17	15	15	88%	-
2.	Informasi peta rawan bencana	100%	100%	100%	100%	-
3.	Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	37,04%	3,70%	0%	10%	10%
4.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	100%	100%	-
5.	Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat	100%	100%	100%	100%	-
6.	Rasio pengurangan risiko bencana	35%	25%	25%	71,42%	-

Tabel T-C.30
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Banyumas**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
1.	Informasi peta rawan bencana	-	-	Indikator Program	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	-	-	Indikator Program	18,52	37,04	55,56	78	100	0	3,70	0	10
3.	Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat	-	-	Indikator Program	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	-	Indikator Program	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	-	IKK	Indikator Tujuan	15	17	20	23	26	15	15	100	88
6.	Rasio pengurangan risiko bencana	-	-	Indikator Program	30	35	40	45	50	25	25	83,33	71,42

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021 dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD sebagai berikut:

- a. Masih tingginya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banyumas (yang termasuk nomor 1 se-Jawa Tengah dan nomor 30 se-Indonesia);
- b. Masih rendahnya Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Banyumas.

Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPBD Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-

hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada saat pra bencana, kejadian bencana maupun pascabencana.
2. SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 83 orang yang terdiri dari PNS, PHL dan juga TRC-PB. TRC-PB yang dijadikan 3(regu) menjadikan BPBD Kabupaten Banyumas sigap memberikan pelayanan yang prima 24 jam penuh kepada masyarakat Kabupaten Banyumas.
3. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas di dalam melaksanakan bagi BPBD Kabupaten Banyumas pada saat pra bencana, saat terjadinya bencana maupun pascabencana.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang kebencanaan, BPBD Kabupaten Banyumas juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Masih kurangnya sarana prasarana bagi BPBD Kabupaten Banyumas seperti komputer ataupun laptop untuk urusan dalam maupun seperti perahu, mobil *ambulance*, alat komunikasi dan prasarana lain yang akan sangat berguna pada saat terjadi bencana berskala besar;
2. Masih kurangnya sarana prasarana bagi BPBD Kabupaten Banyumas seperti komputer atau laptop untuk urusan dalam maupun seperti perahu, mobil *ambulance*, alat komunikasi dan prasarana lain yang akan sangat berguna pada saat terjadi bencana berskala besar;

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam penanggulangan bencana;
2. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang penanggulangan bencana;
3. Adanya dukungan dari eksekutif dan legislatif dalam proses penanggulangan bencana;
4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Banyaknya Lembaga-Lembaga Kemanusiaan yang bisa menjadi mitra kerja;

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin terjadi antara lain:

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana;
2. Tidak menentunya cuaca/iklim di Kabupaten Banyumas, sehingga cukup sulit dalam menentukan target ataupun indikator;
3. Perubahan peraturan perundangan;
4. Kejadian luar biasa pandemi Covid-19.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari

usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup;
2. Adanya mekanisme teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi BPBD Kab. Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- Kurangnya keterlibatan stakeholders pada proses penyusunan perencanaan pembangunan dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan yang terkait dengan dokumen perencanaan
- Pelaksananaan perencanaan tidak tepat waktu karena mekanisme tahapan panjang dan melibatkan banyak pihak dengan peraturan perundangan yang dinamis
- Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum terwujud secara maksimal karena belum sinergisnya kepentingan yang diakomodir

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BPBD Kab. Banyumas tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh BPBD Kab. Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan umum pembangunan daerah
2. Meningkatkan kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD
3. Meningkatkan realisasi pelaksanaan kajian strategi daerah
4. Meningkatkan fasilitasi penerapan inovasi daerah
5. Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan informasi perencanaan
6. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah
7. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan pembangunan ekonomi
8. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia
9. Meningkatkan pelayanan perkantoran
10. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan perangkat daerah

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel C-T.31. Rancangan awal RKPD tahun 2022 menunjukkan BPBD memiliki 2 program dan 10 kegiatan.

Tabel T-C.31
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2022		2023	
					Target	Rp.	Target	Rp.
TOTAL						8.542.569.490		8.675.502.814
Mengurangi Risiko Bencana			Indeks Resiko Bencana	Indeks	166	8.542.569.490	160	8.675.502.814
	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,74	8.542.569.490	0,8	8.675.502.814
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.415.528.625		2.463.800.000
			Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan	%	100	578.563.875	100	595.000.000
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				239.476.250		40.000.000
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	110000	239.476.250	110000	40.000.000
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				200.000.000		-
			Jumlah kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	Kec	0	-	0	-

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2022		2023	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang disusun	Dokumen	1	200.000.000	-	-
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				39.476.250	40.000.000	
			Jumlah informasi yang disampaikan melalui media elektronik/cetak	informasi	1	25.000.000	1	25.000.000
			Jumlah monitoring yang dilakukan di daerah rawan bencana	Kali	10	14.476.250	10	15.000.000
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				339.087.625	555.000.000	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	339.087.625	250	555.000.000
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				-	200.000.000	
			Jumlah dokumen penyusunan rencana penanggulangan bencana yang disusun	Dokumen		-	1	200.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2022		2023	
					Target	Rp.	Target	Rp.
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				95.971.500		100.000.000
			Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Desa	3	95.971.500	3	100.000.000
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				243.116.125		255.000.000
			Jumlah dokumen perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Dokumen	1	-	1	-
			Jumlah sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana yang telah direhab atau direkonstruksi	Paket	1	243.116.125	1	255.000.000
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						
			Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat	%	100	1.831.676.625	100	1.853.800.000
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.831.676.625		1.853.800.000
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	900	1.831.676.625	1000	1.853.800.000
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1.412.142.625		1.423.800.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2022		2023	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Jumlah kecamatan yang mendapatkan penanganan darurat dan atau air bersih untuk masyarakat dampak kekeringan	Kec	27	477.342.625	27	443.400.000
			Jumlah Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibayarkan honorinya	Orang	38	934.800.000	38	980.400.000
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				419.534.000		430.000.000
			Jumlah logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang tersedia	Jenis	2	419.534.000	2	430.000.000
			Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	100	5.288.125	100	15.000.000
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				5.288.125		15.000.000
			Jumlah pelayanan sistem dasar penanggulangan bencana	pelayanan	2	5.288.125	2	15.000.000
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				-		5.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2022		2023	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Jumlah Regulasi Penanggulangan Bencana yang tersusun	regulasi		-	1	5.000.000
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				-		5.000.000
			Jumlah kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana yang dilaksanakan	Keg		-	1	5.000.000
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				5.288.125		5.000.000
			Jumlah pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Keg	1	5.288.125	1	5.000.000
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.127.040.865		6.211.702.814
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	45.302.000	100	90.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2022		2023	
					Target	Rp.	Target	Rp.
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.302.000		90.000.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	45.302.000	4	90.000.000
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		-
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	3	-	3	-
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.302.000		90.000.000
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	45.302.000	1	90.000.000
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	4.089.506.189	100	3.975.000.000
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.089.506.189		3.975.000.000
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	4.089.506.189	2	3.975.000.000
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.014.506.189		3.900.000.000
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	25	4.014.506.189	25	3.900.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2022		2023	
					Target	Rp.	Target	Rp.
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				75.000.000		75.000.000
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	10	75.000.000	10	75.000.000
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	792.228.000	100	909.473.895
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				286.348.000		287.000.000
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	286.348.000	3	287.000.000
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				91.931.000		92.000.000
			Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	50	91.931.000	50	92.000.000
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				174.482.500		175.000.000
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	21	174.482.500	21	175.000.000
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.934.500		20.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2022		2023	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	6	19.934.500	6	20.000.000
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				505.880.000		622.473.895
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	505.880.000	4	622.473.895
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		200.000.000
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	23	200.000.000	23	200.000.000
		X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000
			Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	20	10.000.000	20	10.000.000
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				67.610.000		70.000.000
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	54	67.610.000	54	70.000.000
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				228.270.000		342.473.895

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2022		2023	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	3	228.270.000	3	342.473.895
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.200.004.676	100	1.237.228.919
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				488.658.957		488.500.000
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	488.658.957	6	488.500.000
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.994.000		10.000.000
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	3	9.994.000	3	10.000.000
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.281.500		90.000.000
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5	89.281.500	5	90.000.000
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.943.457		18.000.000
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	1	16.943.457	1	18.000.000
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				144.440.000		142.500.000
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	144.440.000	12	142.500.000
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				28.000.000		28.000.000
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	1500	15.000.000	1500	15.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
					2022		2023	
					Target	Rp.	Target	Rp.
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	43000	13.000.000	43000	13.000.000
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		200.000.000
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	20	200.000.000	20	200.000.000
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				711.345.719		748.728.919
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	711.345.719	2	748.728.919
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.728.919		148.728.919
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	148.728.919	12	148.728.919
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				562.616.800		600.000.000
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	20	562.616.800	20	600.000.000

Purwokerto, 2021
KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS

TITIK PUJIASTUTI, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640402 199103 2 005

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2022 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2022 ada 7 prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RKP 2022 yang mana kebijakannya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 ditujukan pada **“Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai RPJMD tahun 2018-2023 mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan isu strategis pembangunan daerah, maka Prioritas Daerah dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk **Peningkatan ekonomi dengan penguatan daya saing ekonomi dan SDM** dengan mempertimbangkan prioritas nasional, maka Kabupaten Banyumas melakukan penyesuaian prioritas Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

- 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
- 2 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- 3 Peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah
- 4 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
- 5 Pengembangan smart government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan penanggulangan bencana di Kab. Banyumas, membantu Bupati Banyumas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana

pembangunan daerah. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi RPJMD 2018-2023. **"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri"**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi fokus kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas yaitu:

Misi 5: Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyumas Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Kab. Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Mengurangi Risiko Bencana	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan di Kab. Banyumas. Penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi BPBD dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

BPBD mempunyai 2 program dan 10 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lima bidang dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2022 yaitu Rp 7.813.703.000 dengan seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas. Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 pada table T-C.33:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
					2022		2023		
					Target	Rp.	Target	Rp.	
TOTAL						8.542.569.490		8.675.502.814	
Mengurangi Risiko Bencana			Indeks Resiko Bencana	Indeks	166	8.542.569.490	160	8.675.502.814	
	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,74	8.542.569.490	0,8	8.675.502.814	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.415.528.625		2.463.800.000	
			Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan	%	100	578.563.875	100	595.000.000	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				239.476.250		40.000.000	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	110000	239.476.250	110000	40.000.000	
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				200.000.000		-	
			Jumlah kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	Kec	0	-	0	-	
			Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang disusun	Dokumen	1	200.000.000		-	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
					2022		2023		
					Target	Rp.	Target	Rp.	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				39.476.250		40.000.000	
			Jumlah informasi yang disampaikan melalui media elektronik/cetak	informasi	1	25.000.000	1	25.000.000	
			Jumlah monitoring yang dilakukan di daerah rawan bencana	Kali	10	14.476.250	10	15.000.000	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				339.087.625		555.000.000	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	339.087.625	250	555.000.000	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				-		200.000.000	
			Jumlah dokumen penyusunan rencana penanggulangan bencana yang disusun	Dokumen		-	1	200.000.000	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				95.971.500		100.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
					2022		2023		
					Target	Rp.	Target	Rp.	
			Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Desa	3	95.971.500	3	100.000.000	
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				243.116.125		255.000.000	
			Jumlah dokumen perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Dokumen	1	-	1	-	
			Jumlah sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana yang telah direhab atau direkonstruksi	Paket	1	243.116.125	1	255.000.000	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana							
			Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat	%	100	1.831.676.625	100	1.853.800.000	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.831.676.625		1.853.800.000	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	900	1.831.676.625	1000	1.853.800.000	
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1.412.142.625		1.423.800.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
					2022		2023		
					Target	Rp.	Target	Rp.	
			Jumlah kecamatan yang mendapatkan penanganan darurat dan atau air bersih untuk masyarakat dampak kekeringan	Kec	27	477.342.625	27	443.400.000	
			Jumlah Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibayarkan honorinya	Orang	38	934.800.000	38	980.400.000	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				419.534.000		430.000.000	
			Jumlah logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang tersedia	Jenis	2	419.534.000	2	430.000.000	
			Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	100	5.288.125	100	15.000.000	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				5.288.125		15.000.000	
			Jumlah pelayanan sistem dasar penanggulangan bencana	pelayanan	2	5.288.125	2	15.000.000	
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				-		5.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
					2022		2023		
					Target	Rp.	Target	Rp.	
			Jumlah Regulasi Penanggulangan Bencana yang tersusun	regulasi		-	1	5.000.000	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				-		5.000.000	
			Jumlah kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana yang dilaksanakan	Keg		-	1	5.000.000	
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				5.288.125		5.000.000	
			Jumlah pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Keg	1	5.288.125	1	5.000.000	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.127.040.865		6.211.702.814	
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	45.302.000	100	90.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
					2022		2023		
					Target	Rp.	Target	Rp.	
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.302.000		90.000.000	
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	45.302.000	4	90.000.000	
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		-	
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	3	-	3	-	
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.302.000		90.000.000	
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	45.302.000	1	90.000.000	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	4.089.506.189	100	3.975.000.000	
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.089.506.189		3.975.000.000	
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	4.089.506.189	2	3.975.000.000	
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.014.506.189		3.900.000.000	
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	25	4.014.506.189	25	3.900.000.000	

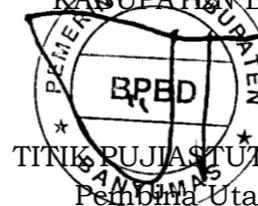
Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
					2022		2023		
					Target	Rp.	Target	Rp.	
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				75.000.000		75.000.000	
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	10	75.000.000	10	75.000.000	
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	792.228.000	100	909.473.895	
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				286.348.000		287.000.000	
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	286.348.000	3	287.000.000	
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				91.931.000		92.000.000	
			Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	50	91.931.000	50	92.000.000	
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				174.482.500		175.000.000	
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	21	174.482.500	21	175.000.000	
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.934.500		20.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
					2022		2023		
					Target	Rp.	Target	Rp.	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	6	19.934.500	6	20.000.000	
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				505.880.000		622.473.895	
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	505.880.000	4	622.473.895	
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		200.000.000	
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	23	200.000.000	23	200.000.000	
		X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000	
			Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	20	10.000.000	20	10.000.000	
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				67.610.000		70.000.000	
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	54	67.610.000	54	70.000.000	
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				228.270.000		342.473.895	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
					2022		2023		
					Target	Rp.	Target	Rp.	
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	3	228.270.000	3	342.473.895	
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.200.004.676	100	1.237.228.919	
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				488.658.957		488.500.000	
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	488.658.957	6	488.500.000	
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.994.000		10.000.000	
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	3	9.994.000	3	10.000.000	
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.281.500		90.000.000	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	6	89.281.500	6	90.000.000	
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.943.457		18.000.000	
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	1	16.943.457	1	18.000.000	
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				144.440.000		142.500.000	
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	144.440.000	12	142.500.000	
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				28.000.000		28.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
					2022		2023		
					Target	Rp.	Target	Rp.	
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	1500	15.000.000	1500	15.000.000	
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	43000	13.000.000	43000	13.000.000	
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		200.000.000	
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	20	200.000.000	20	200.000.000	
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				711.345.719		748.728.919	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	711.345.719	2	748.728.919	
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.728.919		148.728.919	
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	148.728.919	12	148.728.919	
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				562.616.800		600.000.000	
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	20	562.616.800	20	600.000.000	

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS



TINIK PUJIASTUTI, S.H., M.Pd.

Pemohon Utama Muda

NIP. 19640402 199103 2 005

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2018-2023 sebagai berikut:

Matrik Tahun 2022 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Catatan Penting
					2022		
					Target	Rp.	
TOTAL						8.542.569.490	
Mengurangi Risiko Bencana			Indeks Resiko Bencana	Indeks	166	8.542.569.490	
	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,74	8.542.569.490	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.415.528.625	
			Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan	%	100	578.563.875	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				239.476.250	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	110000	239.476.250	
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				200.000.000	
			Jumlah kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	Kec	0	-	
			Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang disusun	Dokumen	1	200.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Catatan Penting
					2022		
					Target	Rp.	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				39.476.250	
			Jumlah informasi yang disampaikan melalui media elektronik/cetak	informasi	1	25.000.000	
			Jumlah monitoring yang dilakukan di daerah rawan bencana	Kali	10	14.476.250	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				339.087.625	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	339.087.625	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				-	
			Jumlah dokumen penyusunan rencana penanggulangan bencana yang disusun	Dokumen		-	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				95.971.500	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Catatan Penting
					2022		
					Target	Rp.	
			Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Desa	3	95.971.500	
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				243.116.125	
			Jumlah dokumen perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Dokumen	1	-	
			Jumlah sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana yang telah direhab atau direkonstruksi	Paket	1	243.116.125	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana					
			Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat	%	100	1.831.676.625	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.831.676.625	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	900	1.831.676.625	
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1.412.142.625	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Catatan Penting
					2022		
					Target	Rp.	
			Jumlah kecamatan yang mendapatkan penanganan darurat dan atau air bersih untuk masyarakat dampak kekeringan	Kec	27	477.342.625	
			Jumlah Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibayarkan honorinya	Orang	38	934.800.000	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				419.534.000	
			Jumlah logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang tersedia	Jenis	2	419.534.000	
			Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	100	5.288.125	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				5.288.125	
			Jumlah pelayanan sistem dasar penanggulangan bencana	pelayanan	2	5.288.125	
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				-	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Catatan Penting
					2022		
					Target	Rp.	
			Jumlah Regulasi Penanggulangan Bencana yang tersusun	regulasi		-	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				-	
			Jumlah kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana yang dilaksanakan	Keg		-	
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				5.288.125	
			Jumlah pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Keg	1	5.288.125	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.127.040.865	
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	45.302.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Catatan Penting
					2022		
					Target	Rp.	
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.302.000	
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	45.302.000	
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	3	-	
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.302.000	
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	45.302.000	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	4.089.506.189	
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.089.506.189	
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	4.089.506.189	
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.014.506.189	
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	25	4.014.506.189	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Catatan Penting
					2022		
					Target	Rp.	
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				75.000.000	
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	10	75.000.000	
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	792.228.000	
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				286.348.000	
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	286.348.000	
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				91.931.000	
			Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	50	91.931.000	
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				174.482.500	
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	21	174.482.500	
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.934.500	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Catatan Penting
					2022		
					Target	Rp.	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	6	19.934.500	
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				505.880.000	
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	505.880.000	
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000	
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	23	200.000.000	
		X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				10.000.000	
			Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	20	10.000.000	
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				67.610.000	
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	54	67.610.000	
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				228.270.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Catatan Penting
					2022		
					Target	Rp.	
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	3	228.270.000	
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.200.004.676	
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				488.658.957	
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	488.658.957	
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.994.000	
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	3	9.994.000	
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.281.500	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	6	89.281.500	
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.943.457	
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	1	16.943.457	
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				144.440.000	
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	144.440.000	
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				28.000.000	
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	1500	15.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022		Catatan Penting
					2022		
					Target	Rp.	
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	43000	13.000.000	
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000	
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	20	200.000.000	
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				711.345.719	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	711.345.719	
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.728.919	
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	148.728.919	
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				562.616.800	
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	20	562.616.800	

Purwokerto, 2021
 KEPALA PELAKSANA BPBD
 KABUPATEN BANYUMAS

 TITIK PUJIASTUTI, S.H., M.Pd.
 Penanggung Jawab
 NIP. 19640402 199103 2 005

BAB V

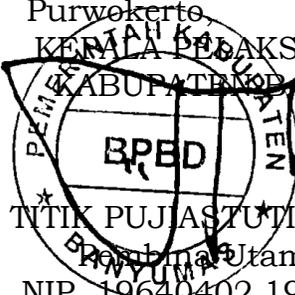
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Banyumas tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) BPBD tahun 2022. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Banyumas tahun 2022, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja BPBD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2022 dan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan-OPD) Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. BPBD dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja BPBD menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.

Purwokerto, 2021
KERANGKA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS

NITIK PUJIASTUTI, S.H., M.Pd.
Kepala Utama Muda
NIP. 19640402 199103 2 005